

Judul : Komisi IV: industri sulit serap tembakau lokal, pembatasan kadar nikotin dan tar
Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembatasan Kadar Nikotin Dan Tar

Komisi IV: Industri Sulit Serap Tembakau Lokal

Komisi IV DPR meminta Pemerintah mencari solusi terbaik atas rencana pengaturan batas kadar nikotin serta tar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pertimbangkan kelangsungan hidup para petani tembakau dan keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT) nasional.

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyampaikan kekhawatiran petani terkait rancangan ketentuan batas kadar nikotin dan tar rokok. Regulasi itu berpotensi berdampak luas terhadap sektor pertembakauan nasional jika Pemerintah tidak mengimbanginya melalui kebijakan perekonomian yang sejalan dengan aspek kesehatan.

Dia bilang, PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya membatasi produk hasil tembakau secara langsung, tapi juga berpotensi memengaruhi seluruh rantai pasok industri. Hal ini melalui penyeragaman bentuk maupun warna kemasan, pembatasan kadar nikotin serta tar, hingga larangan penggunaan bahan tambahan pada rokok.

Tanpa jalan tengah adil, regulasi itu bakal menurunkan daya serap industri terhadap tembakau lokal yang memiliki karakteristik kadar

nikotin khas. "Kondisi itu bakal menekan volume penyerapan hasil panen para petani tembakau di seluruh wilayah dalam negeri kita," katanya, Jumat (25/7/2026).

Penurunan penyerapan tembakau secara berlanjut, kata Panggah, akan memicu merosotnya penerimaan negara serta melonjaknya angka pengangguran di sektor perkebunan tembakau. Makanya, Komisi IV DPR mendorong Pemerintah segera merumuskan kebijakan seimbang antara perlindungan kesehatan masyarakat dengan kelangsungan sektor pertembakauan nasional secara adil.

Sektor IHT, sambungnya, memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional. Sektor itu mampu menyumbang penerimaan negara lebih dari Rp 200 triliun setiap tahun melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT). Selain itu, ekosistem



Panggah Susanto

pertembakauan turut menyerap sekitar enam juta tenaga kerja di berbagai daerah.

Dia minta Negara melihat posisi industri tembakau secara adil demi menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah harus menyusun kajian mendalam secara komprehensif. "Agar seluruh aspek terkait bisa dipertimbangkan secara tepat, serta adil bagi semua pihak," ucapnya.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menambahkan, negara wajib memberikan perlindungan kepada petani tem-

bakau akibat kebijakan yang belum selaras. Kehadiran negara dibutuhkan agar masyarakat pertembakauan tidak berjalan tanpa perlindungan dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menurut Firman, Pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi kebijakan antarkementerian dalam penyusunan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar rokok, agar tidak membebani petani. Karena, karakteristik komoditas tembakau Indonesia sangat berbeda dibanding negara lain. "Formulasi kebijakan wajib disesuaikan dengan kondisi riil di dalam negeri," tegasnya.

Sebagai contoh, komoditas tembakau Temanggung memiliki kadar nikotin alami yang mencapai 5 hingga 10 miligram (mg). Kondisi itu membuatnya sulit memenuhi batas maksimal yang tengah dibahas Pemerintah. Karena itu, Pemerintah harus memiliki arah kebijakan yang jelas terhadap masa depan komoditas tembakau nasional.

Rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar terbukti tidak sesuai dengan karakteris-

tik alami tembakau Indonesia. Terbukti dari dampak langsung pada keberlanjutan varietas tembakau Temanggung. "Kepastian regulasi yang adil bakal jadi kunci utama agar sektor pertembakauan nasional dapat terus berkembang secara berkelanjutan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Edy Sutopo mengingatkan Pemerintah agar tidak menerapkan regulasi berlebihan pada sektor IHT. Aturan yang terlalu ketat berisiko menghilangkan kontribusi ekonomi sebesar Rp 710 triliun per tahun, sekaligus memicu lonjakan rokok ilegal. Ekosistem pertembakauan nasional selama ini sudah berdiri cukup kuat.

Kata dia, sektor pertembakauan menyerap sekitar enam juta tenaga kerja dan menciptakan aktivitas ekonomi Rp 710 triliun. Sektor ini juga menghasilkan devisa 2 miliar dolar AS (sekitar Rp 34 triliun) serta CHT melebihi Rp 200 triliun. "Jika ditambah pajak lainnya, kontribusinya mencapai Rp 300 triliun atau 10 persen penerimaan negara," bebernya. ■ PYB